

**Penghulu dan Kyai di Karesidenan  
Cirebon  
Semangat Keberagamaan dan  
Berpolitik pada Awal Abad ke-20**

Imas Emalia\*

*Abstract: History of the Indonesian Islamic development in the Dutch colonial era is very interesting to be researched. One of them is about the role of the Muslim Scholars (kyai and penghulu). Penghulu when becomes colonial bureaucrat is critized by kyai because he defends a colonial interest while kyai fights them.*

*Kata Kunci: Penghulu, Kyai, Pemerintah Kolonial Belanda, dan Perlawanan.*

**SEJAK** masa kerajaan Islam, Cirebon merupakan salah satu daerah 'jalur sutera' di Jawa Barat yang memberikan peranan penting dalam perekonomian, politik, sosial, dan agama. Bahkan pada abad ke-16, pesisir Cirebon ramai karena kontak dagangnya dengan Malaka. Kebijakan pemerintahannya, sejak pertengahan abad ke-17 dikuasai VOC. Perjanjian demi perjanjian harus ditandatangani penguasanya sebagai bentuk kesepakatan dalam hubungan dagang dan lain-lain. Namun, dengan ikut campurnya VOC dalam pemerintahan Cirebon maka tekanan politik terhadap sultan semakin kuat sehingga akhirnya kekuasaannya semakin meredup dan tidak berpengaruh lagi dalam pemerintahan. Rakyat harus terlebih dahulu mendapatkan izin pemerintah untuk melaksanakan perdagangan dan berlayar untuk kontak dagang dengan pihak luar. Begitu pula dengan pungutan-pungutan pajak dan hasil bumi lainnya yang semakin

---

\*Penulis adalah dosen Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

menekan, mengakibatkan penderitaan rakyat semakin memuncak. Kebijakan tersebut akhirnya banyak memunculkan keresahan di kalangan masyarakat dan pemberontakan yang menelan banyak korban. Hal itu merupakan reaksi yang muncul tidak saja dari kalangan petani, pedagang, dan nelayan melainkan juga agamawan, seperti yang diungkapkan Sartono Kartidirdjo dalam karyanya *Pemberontakan Petani Banten 1888*,<sup>1</sup> di mana seluruh lapisan masyarakat menyikapi dengan keras terhadap praktik pungutan pajak hasil bumi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda, karena sangat mencekik kehidupan rakyat.

Reaksi atau bentuk protes lainnya merupakan wujud dari pergerakan massa dalam menentang kolonialisme di Indonesia. Di setiap daerah hampir seluruh lapisan masyarakat memiliki pola pergerakan yang sama dalam menentang kolonialisme. Puncaknya di awal abad ke-20 yang beragam coraknya seperti serikat dagang, buruh, kelompok intelektual, pergerakan kaum wanita, gerakan keagamaan, dan lain-lain untuk menyalurkan aspirasi-nya demi menuntut haknya.

Karesidenan Cirebon merupakan salah satu daerah jaringan perindustrian kampung kumuhan seperti yang terdapat di Kota Gede Yogyakarta, Batavia, Purwokerto, Pekalongan, Semarang, Surakarta, Kudus, Madiun, Kediri, Surabaya, dan Tulung Agung, di mana para kyai dan santri menjadi motor penggerak pergerakan, bekerja sama dengan Sarekat Dagang Islam

(SDI) dalam bidang ekonomi Islam dengan memberantas sistem riba, pemiskinan, dan ekonomi persaingan bebas.<sup>2</sup>

Dua tahun kemudian hasil kerjasama ini membuahkan hasil, setelah SDI berdiri di Surakarta pada 1911 yang kemudian berganti nama menjadi SI tahun 1912. Cirebon kemudian menjadi basis bagi pergerakan Islam dengan berdirinya SI Cabang Cirebon tahun 1913 yang bergerak aktif dalam bidang pendidikan keagamaan, ekonomi, dan politik kebangsaan, terutama di daerah pemukiman sekitar Kanoman, kampung Trusmi, Indramayu, dan Kuningan. Bahkan keterlibatan keraton dalam pergerakan nasional ini tampak dalam dukungannya terhadap berdirinya SI Cabang Cirebon ini. Di pihak keraton ada yang menjadi anggota aktif dan anggota dewan penasihat SI.

Hal yang sama terjadi di Surakarta, di mana Pesantren Manbaul Ulum yang dibangun Sunan Pakubuwono X pada 1906 berhasil menolak Residen Belanda yang hendak mendirikan rumah sakit bermisi Kristen. Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam pertama yang memakai sistem pendidikan modern Islam, seperti diterapkannya sistem klasikal, digunakannya bahasa asing seperti bahasa Belanda, menulis dan membaca huruf Latin, serta berhitung.<sup>3</sup> Keberhasilan sistem pendidikan pesantren ini kemudian diikuti oleh beberapa pesantren di Jawa, seperti Pesantren Tebu Ireng dan Rejoso, di Jombang, Pondok Modern Gontor, dan

Santi Asrama, lembaga pendidikan milik Persatuan Umat Islam (PUI) di Majalengka, Jawa Barat. Di Karesidenan Cirebon, pangeran Khaeruddin, putera Sultan Kanoman, mengikuti pendidikan di pesantren Buntet yang didirikan oleh kyai Muqoyyim ibn Abdul Hadi yang menjadi penghulu di keraton Kanoman, Cirebon. Sultan Kanoman bahkan mengizinkan keraton sebagai pusat penyebaran tarekat Syatariyah yang diajarkan kyai Muhammad Kriyani yang sering disebut dengan Ki Buyut Kriyan yang ada di pesantren Buntet. Selain itu, Sultan juga mendukung semua aktifitas yang bersifat non-koo-peratif dengan Belanda.

Dalam tulisan ini penulis kemukakan peran penghulu di Karesidenan Cirebon yang memiliki peran ganda, yaitu berperan dalam urusan agama dan politik, di mana pada waktu itu garis pemisah antara agama dan politik sangat jelas. Jika penghulu sudah masuk ke ranah politik biasanya fungsi pengayoman keagamaan di masyarakat terhambat, bahkan-bisa menodai sendi-sendi agama. Dalam hal ini, penulis ingin melihat peran penghulu di Karesidenan Cirebon pada masa kolonialisme ini apakah sama pada umumnya di tempat-tempat lain atau ada perbedaan.

### **Peran Kyai dan Lembaga Pesantren.**

Pada umumnya antara ulama dan kyai pada masa itu dibedakan dengan golongan penghulu yang mendapat posisi jabatan birokrasi dan mereka membentuk kelompok tersendiri.

Penghulu juga terkadang merasa dirinya eksklusif karena kedudukannya yang dekat dengan pusat pemerintahan, baik itu keraton, kabupaten, atau Hindia Belanda. Mereka tergolong penguasa yang agamis dan loyal terhadap pemerintah kolonial. Berbeda dengan kyai atau *ajengan* untuk sebutan di daerah Sunda yang senantiasa berada di pesantren-pesantren, biasanya mereka bersikap menentang pemerintah dan lembaga-lembaga birokrasi lainnya.<sup>4</sup>

Sejak abad ke-19 perkembangan pesantren di Jawa berlangsung cukup pesat. Pesantren dan elit agama Islam menjadi salah satu basis pendidikan tradisional kaum bumi putera. Para kyai di pesantren banyak yang menjadi motor penggerak gerakan protes-protes sosial di sejumlah wilayah, seperti peristiwa pemberontakan di Banten 1888, perlawanan Kyai Ahmad Rifa'i di Pekalongan pada akhir abad ke-19 terhadap penghulu dan bupati di Pekalongan, dan peristiwa Cimareme (SI *Afdeling B*) tahun 1919 di Garut.<sup>5</sup>

Data awal tentang lembaga pendidikan Islam (pesantren) di Jawa, juga lembaga pendidikan Islam lainnya di luar Jawa, seperti di Aceh, banyak dilaporkan Snouck Hurgronje. Dalam laporannya ia menyebutkan:

Pengajian Al-Qur'an ini diberikan secara individual kepada para murid. Biasanya mereka berkumpul di suatu langgar atau di serambi rumah sang guru. Mereka membaca dan melagukan ayat-ayat suci di hadapan guru satu per satu di bawah bimbingan

ngannya selama  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{2}$  jam. Ketika salah seorang menghadap guru, murid yang lainnya dengan suara keras mengulang kaji kemarin atau lanjutan pelajaran yang telah diperbaiki gurunya. Jadi dalam langgar atau rumah semacam itu orang dapat mendengar bermacam-macam suara yang bercampur aduk menjadi satu. Tapi karena semenjak kanak-kanak terbiasa hanya mendengar suara mereka sendiri para murid tersebut tidak terganggu suara murid yang lain.<sup>6</sup>

Dalam sistem pendidikan yang bercorak individual ini tentunya setiap murid tidak sama tingkat kemampuannya. Murid dianggap telah menyelesaikan pendidikannya bila sudah menamatkan membaca Al-Qur'an walaupun belum memahami isi teks Al-Qur'an tersebut. Pada murid yang seperti ini selanjutnya berhak menerima pelajaran kitab-kitab yang terutama berkaitan dengan fiqh ibadah. Kitab-kitab tersebut rata-rata dikarang oleh para ulama Islam terkemuka.

Kyai yang ada di pesantren biasanya terlebih dahulu membacakan kitab tersebut yang kemudian diikuti para santri. Hal ini terus berlanjut setiap hari sebelum para santri menghadap sendiri kepada kyainya untuk menyerahkan dan menerima pelajaran yang baru dan lebih detil lagi. Sistem pelajaran seperti ini disebut sistem *halaqoh* di mana mata pelajaran diberikan secara berkelompok terlebih dahulu dalam satu lingkaran kepada sejumlah santri, yang kemudian masing-masing santri dengan tingkat pencapaian materi yang

berbeda-beda menghadap kyainya untuk mendalaminya.<sup>7</sup> Sistem pendidikan seperti ini biasa dilakukan di pesantren-pesantren di daerah manapun termasuk di luar Jawa. Di Cirebon seperti di pesantren Buntet (pesantren terbesar di Cirebon), pesantren Bobos, pesantren Ciwedus dan Lengkong (keduanya terletak di Kuningan), pesantren Benda Kerep, pesantren Pangurangan, pesantren Wanantara, pesantren Gedongan, pesantren Balerante, dan pesantren Ciwaringin, melakukan sistem pendidikan yang sama seperti tersebut di atas.

Di antara pesantren-pesantren yang disebutkan di atas, pesantren Buntet adalah cikal bakal dari semua pesantren itu, di mana semua kyai yang memimpin pesantrennya adalah alumni pesantren Buntet, dan kyai yang ada di pesantren Buntet sendiri banyak berguru kepada kyai Hasyim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Di Cirebon, kyai mendapat penghormatan yang tinggi dari masyarakat, terlebih sejak menyebarnya tarekat di Indonesia, di mana pesantren menjadi pusat penyebaran tarekat, seperti Naqsyabandiyah, Qadiriyyah, Syatariyyah, terutama untuk daerah Cirebon adalah tarekat Tijaniyyah.

Pijper menyebutkan bahwa Cirebon merupakan pusat pesantren di Jawa Barat dengan pengaruh kyai yang sangat kuat, bahkan berkembang pesat perkumpulan NU dan PUI. Dalam laporannya tentang pengaruh kyai di Cirebon dengan contoh kyai Kracak di Cipeujeuh Sin-

danglaut, seperti yang dikutip di bawah ini:

...bagaimana tingginya martabat kiai, dapat dilihat kyai Kracak di desa Cipeujeuh daerah Sindanglaut. Pada perkawinan atau sunatan anaknya pada tahun 1930 diadakan pesta dua hari, dan dikunjungi oleh 7000 undangan yang berasal tidak hanya dari kabupaten Cirebon tapi juga dari Indramayu, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Pekalongan, dan Semarang. Seorang kyai yang berpengaruh lainnya di Sindanglaut pada waktu yang sama, mengadakan selamatan seribu hari wafat ayahnya bersamaan perkawinan kemenakannya. Tamunya berjumlah seribu orang yang datang dari Barat sampai Banten dan dari Timur sampai Gresik.<sup>8</sup>

Dengan demikian banyak hal yang membuat seorang kyai memiliki kharisma dalam masyarakat sekitarnya dan juga daerah lainnya karena sifat pribadinya yang luhur dan menjunjung tinggi akhlak serta budi pekertinya. Apalagi kedudukannya sebagai pemimpin atau anggota tarekat yang pada waktu itu, abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak berkembang di pulau Jawa dan mendukung antikolonialisme. Sayangnya Pijper tidak menyebut pengaruh pergerakan SI di Cirebon yang justru merupakan pusat pergerakan terbesar di Jawa setelah Surakarta dan Batavia, seperti yang dikemukakan dalam studi Korver tentang SI.

Kyai Kracak, yaitu Muhammad Ismail juga seorang kyai yang sangat dihormati dan mem-

punyai banyak murid dari pulau Jawa dan Madura. Kyai Muhammad Ismail ini bersama temannya di pesantren Kracak aktif dalam menyebarkan tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyyah walaupun sedikit menurun popularitasnya pada tahun 1928 karena datangnya tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah ini kemudian menyebar ke daerah Cirebon dan menarik minat santri-santri pesantren untuk menjadi anggota pengikutnya.<sup>9</sup>

Pesantren Buntet mendukung gerakan tarekat yang baru itu dan ikut aktif dalam penyebarannya sampai ke daerah Kuningan, Tasikmalaya, dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah.<sup>10</sup> Dalam penyebaran ajaran tarekat Tijaniyah ini, kyai Talhah-lah -dari pesantren Buntet- yang paling aktif berperan. Kemudian dilanjutkan kyai Anas ibn kyai Abdul Jamil, dan kyai Abbas ibn kyai Akyas. Mereka adalah tiga bersaudara yang paling gigih dalam penyebaran ajaran tarekat yang baru ini. Dalam perjuangannya, tarekat ini sebetulnya juga sama dengan tarekat-tarekat yang lain, yaitu menyuarakan semangat antikolonialisme. Ia berhasil menyatukan tekad umat Islam di Jawa untuk melawan Belanda, dan bahkan memengaruhi semangat juang umat Islam sampai pada masa revolusi. Sampai saat ini pesantren Buntet masih dikenal masyarakat Cirebon bahkan dari luar daerah dan luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.

### **Penghulu dan Kebijakan Politik Islam Hindia Belanda**

Dari keterangan di atas, dilihat dari aktifitasnya para kyai yang ada di Jawa, dapat dibagi atas dua kategori, pertama kelompok ulama bebas, di mana kedudukan peran sosialnya berada dalam jalur dakwah dan pendidikan agama. Ulama kelompok ini adalah kyai yang mempunyai pondok pesantren dengan tugas utamanya sebagai guru (pengajar) dan mubalig. Mereka kebanyakan hidup di pedesaan. Mereka juga memiliki sikap fanatisme Islam yang tinggi dan sangat antikolonialisme. Mereka menganggap pemerintah kolonial sebagai pemerintahan kafir yang jauh dari ajaran agama Islam, seperti pesantren Buntet, yang terletak di sebelah utara Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, kurang lebih 14 km arah tenggara kota Cirebon. Sejak didirikan oleh kyai Muqoyyim, selaku penghulu keraton pada tahun 1750, pesantren ini sampai periode kyai Abbas (1879-1946) memperlihatkan penentangannya terhadap campur tangan Belanda dalam urusan keraton di Cirebon. Kyai Muqoyyim juga yang menggerakkan pemberontakan rakyat untuk memaksa Belanda agar mengembalikan Pangeran Khaeruddin, putra Sultan Kanoman, yang dibuang ke Ambon. Ia juga yang memotivasi rakyat untuk menentang penobatan Tumenggung Surakarta oleh Belanda ketika Sultan Kanoman meninggal dunia. Karena penobatan ini seharusnya diberikan kepada putranya, yaitu Pangeran Khaeruddin yang dibuang Belanda itu. Berkat perjuangan kyai Muqoy-

yim sebagai penghulu keraton, maka terjadi perubahan administrasi dan kebijakan pemerintah dalam keraton tersebut hingga kemudian Pangeran Khaeruddin dikembalikan dari pembuangannya dan dinobatkan menjadi sultan Kanoman berikutnya menggantikan ayahnya.

Kelompok kedua adalah penghulu<sup>11</sup> (ulama) pejabat, yaitu unsur elit Islam yang juga masuk dalam birokrasi pemerintahan kolonial Belanda. Sebutan bagi mereka adalah *Kanjeng Penghulu Landraad* dan lembaganya adalah lembaga *pengulon*, seperti di daerah swapraja di *Vorstenlanden* yaitu di daerah Kesultanan dan Pakualaman Yogyakarta, Kasunanan dan Mangkunegaran Surakarta.<sup>12</sup> Menurut laporan Pijper, sebutan penghulu ini sebetulnya sudah ada sejak masa kekuasaan Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) dan masa kekuasaan Inggris yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal T. S. Raffles (1811-1816). Jabatan ini disebut *Opper Priesters*, seperti Raffles tulis dalam karyanya *History of Java* (1817) sebutan *priest* untuk seorang penghulu, yang di tingkat bawah biasa disebut dengan *naib*.<sup>13</sup>

Para penghulu di mesjid-mesjid agung di perkotaan merupakan lembaga resmi yang diharapkan mengurus masalah keagamaan dan menjadi penasihat para bupati. Para penghulu ini, sesuai laporan Snouck Hurgronje, diangkat oleh pemerintah daerah yang kemudian diusulkan bupati untuk diangkat oleh pemerintah pusat Hindia Belan-

da. Pada tahun 1930-an pengangkatan penghulu harus melalui ujian kemampuan membaca dan menulis Arab, huruf Latin, dan memahami syari'at Islam.<sup>14</sup>

Tugas para penghulu ini adalah untuk mengawasi para guru agama termasuk para kyai yang ada di pesantren-pesantren. Awalnya mereka bertugas sebagai hakim agama, pemberi penerangan tentang hukum Islam, mengepalai mesjid dan pegawai di bawahnya, mencatat pernikahan, perceraian, rujuk, dan mengawasi segala bentuk pendidikan agama.<sup>15</sup> Penugasan seperti ini sebetulnya dipicu oleh ketakutan pemerintah terhadap guru-guru agama dan para kyai yang dipandang sering membuat hasutan-hasutan terhadap rakyat agar bersikap antipemerintah, seperti telah tersebut di atas. Kondisi ini juga yang kemudian membuat kedudukan mereka, menurut sejarawan Sartono Kartodirdjo, menjadi bertolak belakang dengan elit agama non-formal di pedesaan dan di daerah kauman (tempat tinggal kaum santri) di perkotaan.<sup>16</sup>

Pertentangan antara kyai pesantren dengan para penghulu ini menjadi rahasia umum, pada waktu itu. Para kyai sering mengkritik sepak terjang para penghulu kabupaten dan bawahannya yang justru tidak menjalankan ajaran agama Islam. Seperti mengambil sebagian besar dari penarikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta dari masyarakat untuk kepentingan pribadi. Bahkan sering terjadi penarikan zakat dengan cara paksa. Seperti yang terjadi di daerah Priangan

Barat Afdeling Sukabumi, banyak penghulu yang melakukan tindakan yang menyimpang dari ajaran Islam. Kondisi ini yang memunculkan kritikan tajam dari ajengan Ahmad Sanusi yang menjadi tokoh agama dan pesantren di daerah tersebut. Para penghulu ini lebih suka menyeter zakat itu ke kabupaten atau ke lembaga pemerintahan lainnya dari pada membagikannya kepada fakir miskin yang berhak.<sup>17</sup> Penyelewengan yang terjadi di kalangan penghulu dan bawahannya ini bahkan menjadi laporan dan kritikan Snouck Hurgronje sebagai seorang pejabat dan penasihat tentang Islam pemerintah kolonial sendiri, dengan menyesalkan tingkah laku tersebut yang mencampuri urusan keagamaan di luar wewenang penghulu itu sendiri. Tetapi Snouck sendiri memandang bahwa tidak semua penghulu berperilaku seperti itu, masih banyak di antara mereka yang melaksanakan fungsi utamanya sebagai ulama, yakni menyelenggarakan ajaran agama dengan sebenar-benarnya. Seperti halnya di Cirebon, di mana penghulu merangkap tugas sebagai ulama dan kyai. Mereka menyelenggarakan kegiatan keagamaan bahkan mengkritik pemerintahan yang mengotori kehidupan keagamaan di keraton baik di Kanoman maupun di Kasepuhan yang dijadikan pusat rujukan keagamaan dan budaya masyarakat Cirebon. Bahkan penghulu juga menjadi pengikut tarekat yang sedang berkembang pada waktu itu, yaitu Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syatariyah dan Ti-

janiyah, dan menjadikan keraton sebagai pusat penyebaran tarekat tersebut. Para penghulu di Cirebon sering mengingatkan dan mengajak sultan dan seluruh perangkat pemerintahan keraton untuk tetap menjadi pemimpin dan pelindung umat Islam, dan menganggap keraton selain pusat pemerintahan yang mengatur urusan negara termasuk hubungan politik dan agama, juga sebagai pusat penyebaran agama Islam itu sendiri.

Sikap para kyai dan penghulu di keraton Kasepuhan dan Kanoman Cirebon ini sama seperti yang dilukiskan oleh Larson dalam penelitiannya tentang keraton dan kehidupan politiknya di Surakarta. Larson membuktikan bahwa pihak keraton pernah terlibat dalam pergerakan nasional dengan memberi dukungan terhadap gerakan SI, walaupun pada awalnya bukan tujuan utama keraton tersebut, akan tetapi karena tidak sukanya terhadap sikap dan kebijakan pemerintah kolonial yang dirasakan semakin lama semakin menghimpit pihak Kasunanan.<sup>18</sup> Demikian juga para penghulu di keraton Cirebon dan para kyai di pesantren Buntet berhasil menjalin hubungan selain dengan pesantren-pesantren di Jawa juga dengan koperasi dagang batik di Jawa yang diketuai H. Samanhudi. Hal ini juga karena H. Samanhudi adalah santri dari kyai Abdul Jamil yang memimpin pesantren Buntet sampai tahun 1919, setelah kyai Mutta'ad yang meninggal tahun 1852. Keberhasilan kyai Abdul Jamil ini membuat ia dikenal sebagai politisi keraton dan

tokoh agama yang antikolonialisme. Selain itu kyai Abdul Jamil ini menjabat sebagai dewan Syuriah (penasihat) pada organisasi pedagang batik Jawa tersebut yang dikenal dengan Sya-rekat Dagang Islam (SDI).<sup>19</sup>

Berkat kerjasamanya dengan SDI ini pada tahun 1913 SI sebagai kelanjutan dari SDI berdiri di Cirebon sebagai cabang dari Surakarta.<sup>20</sup> Setelah kepemimpinan kyai Abdul Jamil, pesantren Buntet kemudian dipegang kyai Abbas (1879-1945), putra kedua kyai Abdul Jamil. Sampai masa pergerakan, pendudukan Jepang, dan sampai tahun 1945, kyai Abbas adalah penghulu keraton dan tokoh pejuang dari pesantren Buntet. Ia bahkan terlibat langsung dalam melawan agresi militer Belanda sebagai komandan Sabilillah dan Hizbullah.

Selain SI, organisasi pergerakan keagamaan Islam yang berkembang di Karesidenan Cirebon yang dimotori kyai adalah Persatuan Umat Islam (PUI) yang didirikan kyai Abdul Halim di Majalengka. Kyai Abdul Halim adalah anak penghulu Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat yang lahir tahun 1887. Sejak kecil kyai Abdul Halim belajar dari pesantren ke pesantren yang ada di Majalengka, Kuningan, dan Cirebon.<sup>21</sup>

Pandangan Pijper yang menyoroti organisasi ini sebagai organisasi Islam tradisional harus dipertanyakan, karena organisasi ini justru berhasil mendirikan madrasah dengan sistem klasikal dengan kurikulum modern, meski kyai Abdul Halim mengikuti

mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh kaum Ahlussunnah wal-jama'ah seperti yang banyak dianut kyai-kyai Nahdlatul Ulama (NU). Keberhasilan PUI dalam memajukan pendidikan ini ter dalam laporan majalah bulanan milik PO (Persatuan Oemat) yang kemudian menjadi POI atau PUI. Majalah tersebut adalah *Soeara Islam* yang memuat pemberitaan tentang hasil rapat terbuka PO di Cirebon tanggal 31 Agustus 1926 tentang pembangunan madrasah atau sekolah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dunia dan ilmu pengetahuan akhirat. Sekolah PO ini dibuka di Cirebon. Di bawah ini dikutip tentang pendirian madrasah atau sekolah: *tempatnja anak-anak kita jang lagi diajar mengetahoeikan agamanja Toehan soepaja selamat doenia dan acherat, karena mengetahoei Agama (ilmoe) itoe soeatoe pokok kebaikan jang akan mendjaga dalam keamanan doenja dan acherat.*<sup>22</sup>

Dengan dukungan penghulu Jatiwangi, Majalengka dan pesantren-pesantren di sana, sekolah ini semakin maju dan muridnya bertambah, di mana pada tahun 1927 menjadi 29 orang murid laki-laki dan 6 orang perempuan, sebelumnya hanya 4 orang laki-laki tanpa murid perempuan. Ini merupakan lonjakan jumlah yang signifikan. Lokasi sekolah ini bertempat di Lemahwungkuk No. 129 dekat keraton Kasepuhan, Cirebon.<sup>23</sup>

### **Penutup**

Sejarah perkembangan Islam pada masa kolonial meru-

pakan kajian yang menarik untuk diteliti. Banyak hal yang bisa diteliti tentang peran kyai dan penghulu dalam kedudukannya dalam birokrasi kolonial dan masyarakat umum. Banyak kritikan dilontarkan para kyai dari pesantren terhadap penghulu yang membela kepentingan kolonial. Sedangkan kyai-kyai pesantren justru melawan pemerintah kolonial. Banyak pemberontakan (perlawanan) terhadap kolonial Belanda dilakukan atas inisiatif kyai-kyai pesantren selama akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20.

Para penghulu keraton di Cirebon adalah kyai-kyai pemimpin pesantren. Mereka adalah pemimpin agama yang kharismatik dan sangat menjaga keraton sebagai simbol pelindung agama Islam dan pusat penyiaran Islam, bahkan keraton menjadi pusat perkembangan tarekat. Para penghulu di keraton Cirebon berbeda dengan para penghulu di kabupaten-kabupaten di Jawa yang seringkali sangat dibenci umat karena menyelewengkan penyaluran zakat.

Para penghulu keraton Cirebon pada awal abad ke-20 adalah pendukung SDI dan SI yang aktif. Sementara di Majalengka kyai Abdul Halim putra penghulu Jatiwangi mendirikan organisasi keislaman POI yang memperjuangkan pendidikan modern bagi umat Islam.

### **Catatan Akhir:**

1. Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1984.
2. Kuntowijoyo, *Muslim Kelas Menengah Indonesia dalam Mencari Identitas*

- 1910-1950 dalam *Prisma*, No. 11/1985/th. XIV, h. 37-40, lihat *Fadjar*, Surat Kabar Si Cabang Cirebon, No. 151, th. Ke-2, Juli 1927.
3. Azyumardi Azra, Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan, dalam Kata Pengantar, Nurkholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: sebuah Potret Perjalanan*, Paramadina, Jakarta, 1997, h. XV.
  4. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 134-136. Lihat Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, h. 30.
  5. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.* Lihat A. P. E. Korver, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?*, Graffiti Press, Jakarta, 1985. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Sebuah Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan, Bandung, 1991
  6. Snouck Hurgronje, *Verpreide Geschriften IV*, h. 161, dalam Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, LP3ES, Jakarta, 1991, h. 11
  7. Karel A. Steenbrink, *op. cit.*, h. 11-15
  8. G. F. Pijper, *Pragmenta Islamica: Beberapa Studi Mengenai Islam di Indonesia Awal Abad XIX*, Terj. Tudjimah, UI Press, Jakarta, 1987, h. 80-81
  9. G. F. Pijper, *op. cit.*, h. 98-99 dan Ajid Thohari, *Gerakan Politik Kaum Tarekat: Telaah Historis Gerakan Antikolonialisme Tarekat Qadiriyyah-Naqsyabandiyah di Pulau Jawa*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2002, h. 121-122
  10. G. F. Pijper, *op. cit.*, h. 99-101
  11. Kata penghulu dalam bahasa Sunda: pangulu, Jawa: pengulu, dan Melayu: penghulu, asal katanya hulu yang berarti kepala, awalnya artinya orang yang mengepalai, kemudian menjadi orang yang terpenting, dan akhirnya mempunyai arti orang yang mengerti dalam bidang agama Islam yang diangkat oleh yang berwajib. G. F. Pijper, *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, Terj. Tudjimah dan Yessy Agusdin, UI Press, Jakarta, 1985, h. 67
  12. Ibnu Qoyyim Ismail, *Kyai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, GIP, Jakarta, 1997.
  13. G. F. Pijper, *Beberapa, loc. cit.*
  14. Ibnu Qoyyim Ismail, *op. cit.*, h. 65-66
  15. Surat Snouck Hurgronje kepada Gubernur Jenderal tanggal 2 Juli 1891 dalam E. Gobebe dan C. Adriane, eds., *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaian kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, INIS, Jakarta, 1991, h. 822-882 dan G. F. Pijper, *Beberapa, op. cit.*, h. 72-84
  16. Ulama perkotaan biasanya berorientasi modern karena menyerap perkembangan ilmu pengetahuan dan gerakan pembaruan Islam dari Timur Tengah dan tokoh-tokoh pembaharu Islam yang ada di Eropa, seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*, Gramedia, Jakarta, 1990.
  17. Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat 1900-1950*, Matabangsa, Yogyakarta, 2001, h. 139-142.
  18. George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, terj. UGM Press, Yogyakarta, 1990.
  19. Muhaemin A. G., *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Logos, Jakarta, 2001, h. 316-319.
  20. *Fadjar*, Surat Kabar Boeat Segala Bangsa di Hindia Belanda, Koran Milik Si Cirebon, No 151, 10 Juli 1922.
  21. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1991, h. 81.
  22. *Soeara Islam*, No. 1, Juni 1927, Madjalah Milik Persjarekatan Oelama Terbit di Cheribon, Susunan Pengurus Soeara Islam adalah: Keteoa: H. Abdulhalim, Kepala Pengarang dan Penanggung Djawab: P. Moehammad Zen, Cheribon, Madjells Pengarang Bahagian Agama, H. Basoeni, H. Abdoelgani (Cheribon), Moehammad Kelan, Ilham (Madjalengka), Harga Langganan di Hindia 3 Boelan

f.0,75,-, Loear Hindia f. 1,- Harga Lembaran f 0,3,-, Madjalah Ini Mempoenjal Motto Berhaloean Menoentoet Kebenaran dalam Agama Islam. Terbit Setiap Hari Pertama Setiap Boelan.

23. *Soeara Islam*, No. 1, Juni 1927

**Daftar Pustaka:**

- Gobee, E. dan C. Adriaanse, eds., *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, INIS, Jakarta, 1991.
- Iskandar, Mohammad, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat 1900-1950*, Matabangsa, Yogyakarta, 2001.
- Ismail, Ibnu Qoyyim, *Kyai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, GIP, Jakarta, 1997.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1984.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Korver, A. P. E., *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?*, Grafiti Press, Jakarta, 1985.
- Larson, George D., *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, UGM Press, Yogyakarta, 1990
- Madjid, Nurkholis, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Paramadina, Jakarta, 1997.
- Muhaimin A. G., *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Logos, Jakarta, 2001.
- Noer, Dellar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1999.
- Pijper, G. F. *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, Terj. Tudjimah dan Yessy Augusdin, UI Press, Jakarta, 1985.
- , *Pragmenta Islamica: Beberapa Studi Mengenai Islam di Indonesia Awal Abad XIX*, Terj. Tudjimah, UI Press, Jakarta, 1987.
- Steenbrink, Karel A, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, LP3ES, Jakarta, 1991.
- Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- Thohir, Ajid, *Gerakan Politik Kaum Tarekat: Telaah Historis Gerakan Antikolonialisme Tarekat Qadiriyyah-Naqsyabandiyah di Pulau Jawa*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2002.
- Fadjar*, Surat Kabar Boeat Segala Bangsa di Hindia Belanda, Koran Milik SI Cirebon, No 151, 10 Juli 1922.
- Soeara Islam*, No. 1 Juni 1927, Madjalah Milik Persjarekatan Oelma Terbit di Cheribon.
- Prisma*, No. 11/1985/th. XIV

---

## MELUASNYA RIBA

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

لَبِئْسَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا  
فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ عِبَائِهِ

"Akan datang suatu masa dimana semua manusia di dalamnya adalah pemakan riba, walaupun ada yang tidak memakan riba kala itu, tapi ia pasti terkena debunya."<sup>105</sup>

– Hadits ini shahih –  
(Diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah)